



Kisruh APBD DKI 2015

Seluruh Fraksi Dukung Hak Angket

Ahok tak gentar diancam pemakzulan.

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Jhonny Simanjutak, mengatakan dalam waktu dekat Dewan akan menggunakan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Hak angket yang kami ajukan adalah mengenai pelanggaran proses pengajuan APBD oleh Pemerintah Provinsi DKI,” ujar Jhonny, di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Hak angket tersebut, kata dia, diambil atas kesepakatan seluruh fraksi dalam rapat tertutup yang berlangsung selama hampir dua jam. “Seluruh fraksi menyetujui digulirkannya hak angket,” katanya.

Jhonny menjelaskan, tujuan penggunaan hak angket adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD dan gubernur harus sesuai dengan undang-undang. Hak angket, tutur dia, juga bertujuan menciptakan ketertiban sosial.

Sebelumnya, beberapa politikus dari Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan ihwal pengembalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri pada 7 Februari lalu.

Kementerian menilai anggaran yang disampaikan pemerintah DKI, senilai Rp 73 triliun, tak lengkap dan salah format. Dua hari berselang, DPRD menyerahkan APBD yang bentuknya yang dianggap sesuai dengan ketentuan dan diklaim sesuai dengan hasil rapat paripurna. Anggota Dewan menuding Ahok melanggar hukum karena mengirim rincian APBD

yang tak pernah dibahas bersama Dewan.

Menurut Jhonny, pemerintah dan Dewan telah menyepakati APBD. “Namun ada prosedur yang dilanggar oleh Gubernur,” ucapnya. Ia menjelaskan, APBD yang dikirim oleh Ahok ke Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan yang dibahas bersama Dewan.

“Dalam rapat gabungan dengan seluruh fraksi, kami berpendapat hal tersebut merupakan pelanggaran yang disengaja, dan ini merupakan pengebirian hak serta fungsi Dewan yang berlandaskan konstitusi,” tutur Jhonny.

Jhonny terang-terangan menegaskan bahwa hak angket tersebut bertujuan memakzulkan Ahok. “Supaya jelas bagi masyarakat karena kami, Dewan, yang selalu dijadikan biang kerok dalam molornya pengesahan APBD,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, mengatakan seluruh fraksi dan komisi di DPRD menyetujui penggunaan hak interpelasi dan angket. “Bahkan PDIP juga menyetujuinya,” ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin, mengatakan Ahok telah melanggar prosedur *e-budgeting* dalam penyusunan APBD. “*E-budgeting* itu seharusnya di akhir, saat APBD telah disepakati. Bukan di depan, sebelum APBD disepakati,” ujar Selamat.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Maman Firmansyah. “*E-budgeting* bukan proses dalam pengajuan APBD yang sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak gentar mengha-

dapi ancaman pemakzulan tersebut. “Silakan ajukan hak angket. Kalau dia mau *impeach*, silakan *impeach*.”

● GANGSAR PARIKESIT | LINDA KHAIRANI |
YOLANDA RYAN ARMINDYA